

**PENERAPAN PSAK NO. 101 TERHADAP PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH  
(Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tursina Surabaya)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**RITA NOVIANA**  
**2008310412**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2012**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rita Noviana  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Februari 1989  
N.I.M : 2008310412  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : Penerapan PSAK No. 101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tursina Surabaya)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 13/3/2012



**(Dra. Nur Suci L. Mei Murni, Ak., M.M.)**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal : .....



**(Suprivati, SE., M.Si., Ak.)**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Rita Noviana
2. Nama Panggilan : Rita
3. Tempat dan Tanggal lahir : Surabaya, 6 Februari 1989
4. Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat 1B No. 37 Surabaya
5. No. Telpon / HP : 031-60568900 / 085733666000
6. Alamat Email : [ritanovianna@yahoo.co.id](mailto:ritanovianna@yahoo.co.id)
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya

---

### **PENDIDIKAN**

- 2008 – 2012 STIE Perbanas Surabaya
- 2004 – 2007 SMA Trimurti Surabaya
- 2001 – 2004 SMP Negeri 25 Surabaya
- 1995 – 2001 SDN Dukuh Kupang I Surabaya

---

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- 2010 – 2011 Paskibraka STIE Perbanas Surabaya sebagai Divisi Perlengkapan
- 2009 – 2010 Paskibraka STIE Perbanas Surabaya sebagai Anggota

**PENERAPAN PSAK NO. 101 TERHADAP PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH  
(Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tursina Surabaya)**

**Rita Noviana**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [ritanovianna@yahoo.co.id](mailto:ritanovianna@yahoo.co.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of the research was to find know the BMT application of PSAK No. 101 in financial report presentation. PSAK No. 101 as a standard in the Islamic financial report presentation. Indonesian Accountant Association (IAI) had determined the Standard Statement of Financial Accountant (PSAK) No. 101 to create standard Islamic financial report. Research method used in the method of data collection survey conducted by coming directly to BMT. The result showed that BMT financial report wasn't appropriate to PSAK No. 101 because not completed the financial report in the apartment as well as access to information PSAK No. 101 from IAI is still very limited.*

**Key words** : PSAK No. 101, Islamic Financial Report, BMT

**PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia di abad 21 ini banyak diramaikan dan diwarnai oleh ekonomi syariah. Mulai dari bank syariah, BPR syariah, Reksadana syariah, Multi Level Marketing syariah (Ahad-Net) dan koperasi syariah. Undang-Undang No. 10/1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia telah secara nyata melegalkan dan mengukuhkan keberadaan bank syariah di persada Nusantara ini. Bahkan kini sudah lahir Undang-Undang Perbankan Syariah secara khusus yaitu UU No. 21/2008 dan UU SBSN No. 19/2008. Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang menjadi syariah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha koperasi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Salah satu usahanya adalah simpan pinjam. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah unit simpan pinjam sama seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tamwil. BMT sebagai baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq, dan sedeqah. Penyalurannya diaplikasikan kepada mereka yang berhak (mustahiq) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan waqaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan keuangan, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan oleh BMT. Sedangkan BMT sebagai baitul tamwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun

dana dari masyarakat melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil. BMT pada awalnya berbadan hukum berupa izin operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). PINBUK adalah kelompok Swadaya Masyarakat ICMI yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang mendukung program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM). Selanjutnya BMT harus menguatkan badan hukumnya menjadi koperasi syariah agar kedudukan BMT tidak lagi sekedar sebagai KSM, tetapi betul-betul resmi dilindungi Undang-Undang. BMT telah berkembang dengan baik sehingga memenuhi syarat sebagai BPR Syariah dapat dimintakan izin kepada pemerintah menjadi BPR Syariah dengan Badan Hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.

Hadirnya lembaga ekonomi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga ekonomi syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang berhubungan dengan lembaga ekonomi syariah. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber – sumber untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip – prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan

terhadap lembaga yang bersangkutan. Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan masyarakat terhadap kemampuan lembaga ekonomi syariah dalam mencapai tujuannya. Diantara sumber – sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari lembaga ekonomi syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada lembaga ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Isnani Yuli Andini dan Nur Hayati (2009), Musyarofah Siti (2009), Muhammad (2003), dan Hendi Yogi Prabowo (2003) mengenai pentingnya suatu standar penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah.

Berbagai uraian di ataslah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap penyajian laporan keuangan syariah. Penelitian ini ingin mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan pada BMT yang berbadan hukum koperasi syariah dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

## **RERANGKA TEORITIS**

### **Pengertian Akuntansi**

Warren et al (1995) menjelaskan bahwa “*Accounting may be defined as an information system that provides reports to various individuals or groups about economic activities, an organization or other entity*“, yang diterjemahkan sebagai berikut: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2005:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2005:10) mendefinisikan

akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2005:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Sitio (2001:108) tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi.
- b) Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode.
- c) Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
- d) Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi.
- b) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi.
- c) Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri.
- d) Transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.
- e) Sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 8 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) dana syirkah temporer;
- (d) ekuitas;
- (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) arus kas;
- (g) dana zakat; dan
- (h) dana kebajikan.

### **Unsur – Unsur Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101**

Menurut PSAK No. 101 paragraf 11 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen – komponen berikut ini:

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan arus kas;
- (d) laporan perubahan ekuitas;
- (e) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (g) catatan atas laporan keuangan.

#### **Neraca**

PSAK No. 101 paragraf 45 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Menurut PSAK No. 101 paragraf 56 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan, dalam neraca atau di catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos – pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi, dan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.

#### **Aset Lancar**

PSAK No. 101 paragraf 47 menyatakan bahwa Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau

- (c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

#### **Kewajiban Jangka Pendek**

PSAK No. 101 paragraf 49 menyatakan bahwa Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- (a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau
- (b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut PSAK No. 101 paragraf 52 menyatakan bahwa neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos – pos berikut:

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Aset keuangan;
- (c) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- (d) Persediaan;
- (e) Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas;
- (f) Aset tetap;
- (g) Aset tidak berwujud;
- (h) Utang usaha dan utang lainnya;
- (i) Utang pajak;
- (j) Dana syirkah temporer;
- (k) Hak minoritas; dan
- (l) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul, dan sejumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

#### **Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi (*income statement*) menurut Kieso et. al. (2002:150) adalah "Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan

selama periode waktu tertentu”. Menurut PSAK No. 101 paragraf 66 menyatakan entitas syariah mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen per saham yang diumumkan.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menurut PSAK No. 101 paragraf 60 menyatakan bahwa laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut:

- (a) Pendapatan usaha;
- (b) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- (c) Beban usaha;
- (d) Laba atau rugi usaha;
- (e) Pendapatan dan beban non-usaha;
- (f) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- (g) Beban pajak; dan
- (h) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul, dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 62 menyatakan bahwa jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

#### **Laporan Perubahan Ekuitas**

PSAK No. 101 paragraf 67 menyatakan bahwa Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- (b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;

- (c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
- (d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- (e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- (f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.”

Dalam PSAK No. 101 paragraf 68 menyatakan bahwa perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.

#### **Laporan Arus Kas**

Menurut IAI dalam PSAK No. 101 paragraf 69 menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait.

#### **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat**

Menurut PSAK No. 101 paragraf 70 menyatakan bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
  - (i) Zakat dari dalam entitas syariah;
  - (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah;



- (b) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
  - (i) Fakir;
  - (ii) Miskin;
  - (iii) Riqab;
  - (iv) Orang yang terkihat utang (gharim);
  - (v) Muallaf;
  - (vi) Fisabilillah;
  - (vii) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
  - (viii) Amil.
- (c) Kenaikan atau penurunan dana zakat;
- (d) Saldo awal dana zakat; dan
- (e) Saldo akhir dana zakat.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 74 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- (b) sumber dana zakat yang berasal dari entitas eksternal syariah;
- (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing – masing asnaf; dan
- (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing – masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak – pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

#### **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**

Menurut PSAK No. 101 paragraf 75 menyatakan bahwa entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan;
  - (i) infaq;
  - (ii) sedekah;
  - (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
- (v) denda; dan
- (vi) pendapatan non-halal
- (b) penggunaan dana kebajikan untuk:
  - (i) dana kebajikan produktif;
  - (ii) sumbangan; dan
  - (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 79 menyatakan bahwa entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing – masing penerima;
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing – masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak – pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan
- (d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

#### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No. 101 paragraf 80 menyatakan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- (b) informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan laporan penggunaan dana kebajikan; informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

### **Tinjauan Umum tentang Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**

Menurut Soemitra (2004:448), secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- a) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta

makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.

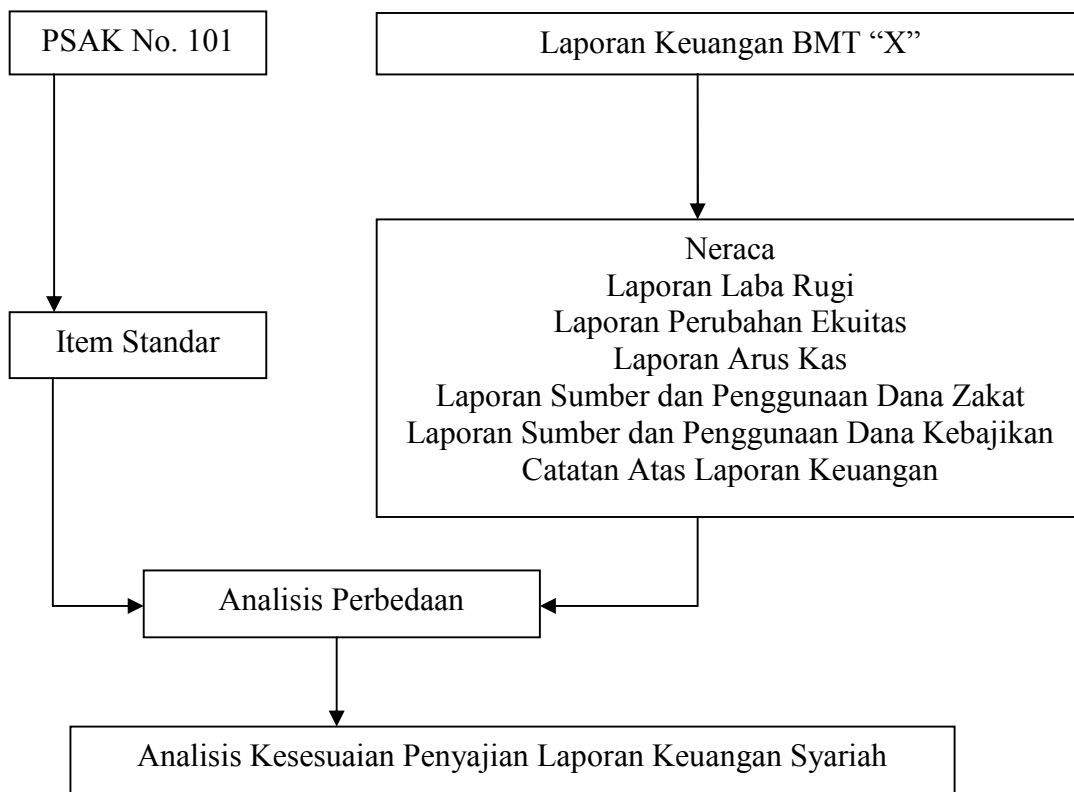
- e) Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya; (2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; dan (3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- f) Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:
  1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
  2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
  3. Kekeluargaan (kooperatif);
  4. Kebersamaan;
  5. Kemandirian;
  6. Profesionalisme; dan
  7. Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.
- g) Ciri-ciri BMT, yaitu:
  1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
  2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya; dan
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu

sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan di gambar 1 :

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (Applied Research) yang mengarah pada penggunaan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak dilakukan oleh para penelitian karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna

untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia (Hartoto, 2009).

### **Batasan Penelitian**

Mengingat PSAK No. 101 sebagai suatu standar yang baku dalam laporan keuangan lembaga syariah yang menyediakan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, penelitian ini hanya dibatasi pada praktek penyajian laporan keuangan BMT "X" khususnya neraca dan laporan laba rugi berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

### **Unit Analisis**

Unit analisis digunakan untuk melakukan penelusuran dan pencarian data guna

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi untuk pengumpulan data. Secara fundamental unit analisis berkaitan dengan rumusan masalah yang dapat diketahui bagaimana penerapan system akuntansi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Unit analisis pada penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan BMT “X” di Surabaya.

#### **Data dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian. Dalam hal ini adalah BMT “X”. Data yang digunakan adalah keterangan yang dikumpulkan dari hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait.

Data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah tersedia atau telah ada pada BMT “X” seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **Dokumentasi**

Yang dilakukan adalah dengan membuat salinan terhadap dokumen-dokumen atau arsip, catatan, maupun buku-buku yang ada di perusahaan, khususnya gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan data laporan keuangan perusahaan.

##### **Wawancara**

Yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan data dengan mengajukan pertanyaan dalam wawancara.

##### **Observasi**

Yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari BMT “X”.

#### **Teknik Analisis Data**

Penulisan ini dimaksudkan agar data-data yang telah berhasil dikumpulkan selama penelitian dan telah diolah atau dirangkum dalam bentuk data yang dapat diterangkan dan disimpulkan dengan jelas.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengamati dan memperoleh data tentang gambaran umum dan struktur organisasi BMT “X”, (2) Menyediakan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, (3) Menghitung tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan pada PSAK No. 101, (4) Menganalisis data tersebut, (5) Hasil penjumlahan nilai bobot diklasifikasikan ke dalam bentuk skor tingkat kesesuaian, dan (6) Pembahasan hasil klasifikasi dalam bentuk deskriptif.

#### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

##### **Pengungkapan Penyajian Laporan Keuangan pada BMT KP Tursina**

BMT KP Tursina menyajikan laporan keuangan syariah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam setiap periode. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak BMT KP Tursina menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) investasi tidak terikat; dan
- (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.

Dalam menyusun komponen laporan keuangan, pihak BMT KP Tursina harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali untuk perhitungan pendapatan yang bertujuan untuk pembagian hasil usaha yang didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasi menjadi kas (*dasar kas*). Laporan keuangan yang disusun oleh pihak BMT KP Tursina disajikan secara konsisten yang mencakup periode satu tahun.

BMT KP Tursina membagi antara lancar dengan tidak lancar dan jangka pendek dengan jangka panjang dalam komponen neraca. Dimana aset lancar disajikan secara terpisah dengan aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek disajikan terpisah dengan kewajiban jangka panjang. Serta mengungkapkan

informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum atau sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Siklus operasi BMT KP Tursina merupakan rata-rata jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses dan realisasinya menjadi kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi, dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi walaupun aset tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Pos – pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos – pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca.

Penyusunan komponen laporan laba rugi oleh pihak BMT KP Tursina disajikan dengan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Dimana laporan laba rugi tersebut mencakup pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, serta pendapatan non halal.

BMT KP Tursina masih menyajikan pendapatan non halal pada komponen laporan laba rugi karena pihak BMT KP Tursina menganggap bahwa pendapatan non halal tersebut tidak bersifat materialistis.

## **Analisa Perbandingan Antara Laporan Keuangan BMT KP Tursina dengan PSAK No. 101**

Penelitian ini meneliti apakah BMT KP Tursina sudah menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Analisis perbandingan laporan keuangan BMT KP Tursina dengan PSAK No. 101 (dibandingkan dengan laporan keuangan perbankan syariah), yang diuraikan sebagai berikut:

### **Neraca**

#### **1) Aktiva**

Secara umum, bagian aktiva dari neraca BMT KP Tursina di Surabaya untuk periode 2010 telah sesuai dengan PSAK No. 101 yaitu terdiri dari aktiva lancar, dan aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Namun, pada penyajiannya masih ada perbedaan yaitu dalam pemberian nama akun. Hal itu, dikarenakan BMT KP Tursina memiliki produk yang berbeda dengan penyajian laporan keuangan yang ada dalam PSAK No. 101 (yang menjadi contoh penyajian laporan keuangan dalam PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yaitu perusahaan perbankan karena untuk laporan keuangan BMT belum disajikan secara khusus), yaitu terdiri dari:

- a) Akun aktiva lancar dalam neraca BMT KP Tursina di Surabaya terdiri dari akun kas, tabungan dan simpanan pada bank, surat berharga, piutang, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sedangkan, berdasarkan PSAK No. 101 terdiri dari akun kas, penempatan pada bank, giro pada bank lain, investasi pada efek/surat berharga, piutang dan pembiayaan.
- b) Akun aktiva tetap dalam neraca BMT KP Tursina terdiri dari akun ijarah, aktiva istishna dalam penyelesaian, aktiva tetap dan akumulasi penyusutan sedangkan akun aktiva lain-lain terdiri dari akun persediaan serta aktiva lain-lain. Sedangkan, aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 101 terdiri dari akun asset yang diperoleh untuk

ijarah, istishna dalam penyelesaian, penyertaan, asset tetap dan akumulasi penyusutan serta akun aktiva lain-lain terdiri dari akun persediaan, tagihan dan kewajiban akseptasi, dan asset lainnya.

## 2) Kewajiban

Kewajiban pada neraca BMT KP Tursina terdiri dari akun kewajiban segera, tabungan wadi'ah, hutang salam, hutang istishna, kewajiban lainnya. Akun-akun kewajiban BMT KP Tursina ini telah sesuai dengan PSAK No. 101.

## 3) Ekuitas

Ekuitas pada neraca BMT KP Tursina periode 2010 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba (rugi). Sedangkan dalam PSAK No. 101 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba (rugi). Akun-akun ekuitas pada neraca BMT KP Tursina ini telah sesuai dengan PSAK No. 101.

### **Laporan Laba Rugi**

Pendapatan dan beban adalah bagian dari laporan laba rugi. Pendapatan BMT KP Tursina terdiri dari pendapatan usaha. Dimana pendapatan usaha tersebut terdiri dari pendapatan margin / bagi hasil / nisbah, pendapatan administrasi, dan pendapatan operasional lainnya. Sedangkan pendapatan dalam PSAK No. 101 pendapatannya dibagi dalam dua nama akun yaitu pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dan pendapatan usaha lainnya.

Beban dalam laporan laba rugi BMT KP Tursina terdiri dari beban bagi hasil / nisbah pembiayaan, beban SDM / pegawai, beban operasional lainnya, beban pelunasan dini, serta biaya cadangan. Sedangkan beban dalam PSAK No. 101 dibagi menjadi dua nama akun yang terdiri dari beban usaha, beban nonusaha, dan beban pajak.

### **Kesesuaian Laporan Keuangan dengan PSAK No. 101**

Dari hasil analisa perbandingan yang telah dideskripsikan di atas, laporan keuangan BMT KP Tursina terdiri atas neraca dan laporan laba

rugi. Sehingga informasi keuangan yang disajikan BMT KP Tursina masih kurang lengkap. Hal ini disebabkan karena dalam PSAK No. 101 penyajian laporan keuangan syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, agar penyajian laporan keuangan di BMT KP Tursina sesuai dengan PSAK No. 101, maka BMT KP Tursina harus menambahkan beberapa komponen dari laporan keuangan yang belum disajikan agar informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan lebih lengkap.

### **Neraca**

Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh BMT KP Tursina agar neraca yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 yaitu: (1) Dengan menyesuaikan pos – pos yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 seperti akun tabungan & simpanan pada bank diubah menjadi penempatan pada bank lain, (2) Akun aktiva tetap dan akun akumulasi penyusutan aktiva tetap dijadikan dalam satu nama akun yaitu akun aset tetap dan akumulasi penyusutan, (3) Akun penyisihan penghasilan pembiayaan dari piutang murabahah diubah menjadi akun penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Perhitungan PPAP tersebut di kelompokkan menjadi empat kelompok yaitu dalam kelompok lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

### **Laporan Laba Rugi**

Untuk penyesuaian dari laporan laba rugi, peneliti akan memisahkan pendapatan BMT KP Tursina menjadi dua akun yaitu yang berasal dari pendapatan dari jual beli dan pendapatan administrasi. Pemisahan ini dilakukan terhadap pendapatan dari dua unit usaha BMT dimana pendapatan dari luar unit – unit usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan lain – lain. Adapun uraian dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan usaha dibagi menjadi pendapatan

dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil, serta pendapatan administrasi dalam laporan keuangan BMT KP Tursina disajikan dalam laporan laba rugi yang diurutkan setelah pendapatan dari bagi hasil, (2) Pendapatan lain – lain yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan urutan setelah laba usaha. Pendapatan lain – lain dalam laporan keuangan BMT KP Tursina terdiri dari pendapatan dari rekening selisih, pendapatan non halal, serta pendapatan lain – lain. Dimana pendapatan non halal tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi BMT KP Tursina. Informasi mengenai pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adapun alasan tidak boleh disajikan karena penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang, (3) Beban usaha BMT KP Tursina merupakan segala biaya baik yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam kegiatan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan dalam suatu periode akuntansi, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan perusahaan pada periode berikutnya. Yang terdiri dari beban bagi hasil, beban kepegawaian, beban usaha lainnya, beban pelunasan dini, serta biaya cadangan, dan (4) Dalam penyajian dan klasifikasi pos – pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten dalam penggunaan nama akun yang terkait. Misalkan dalam komponen neraca terdapat akun simpanan berjangka yang berkaitan dengan perhitungan beban bagi hasil atas akun tersebut. Namun perhitungan beban bagi hasil atas akun tersebut disajikan dengan nama akun beban bagi hasil deposito dalam komponen laporan laba rugi BMT KP Tursina. Sehingga

untuk menyesuaikan penyajian penggunaan nama akun yang terkait maka akun beban bagi hasil deposito dirubah menjadi beban simpanan berjangka.

### **Hasil Analisis**

Dari hasil penelitian, BMT KP Tursina belum menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Sehingga penulis juga melakukan tahap pembuatan checklist untuk membuktikan tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah berdasar PSAK No. 101.

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti telah melakukan tahap wawancara maupun pembuatan checklist. Pembuatan checklist digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menyesuaikan laporan keuangan BMT KP Tursina dengan PSAK No. 101. Dalam laporan keuangannya, BMT KP Tursina telah menyusun dua komponen laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

Hasil pembuatan checklist menunjukkan bahwa untuk komponen neraca, peneliti membuat tiga point checklist untuk menyesuaikan laporan keuangan BMT KP Tursina dengan PSAK No. 101. Dari ketiga point checklist tersebut pihak BMT KP Tursina sudah sepenuhnya memenuhi tingkat kesesuaian laporan keuangan neraca berdasarkan PSAK No. 101, sehingga peneliti dapat memberikan skor tingkat kesesuaian sebesar 100%.

Untuk hasil checklist laporan laba rugi, peneliti memberikan skor tingkat kesesuaian sebesar 67% karena BMT KP Tursina hanya memenuhi dua dari tiga point checklist penelitian untuk menyesuaikan laporan laba rugi berdasar PSAK No. 101. Adapun penyebab ketidaksesuaian point checklist tersebut karena masih terdapat akun pendapatan non-halal pada laporan laba rugi yang seharusnya akun tersebut harus dilaporkan pada komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

**Tabel 1**  
**BMT KP TURSINA**  
**NERACA (PENYESUAIAN PSAK NO. 101)**  
**PER 31 DESEMBER 2010**

Uraian	Jumlah
<b>AKTIVA</b>	
Kas	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Pinjaman Qardh	xxx
Penyisihan penghapusan aktiva tetap (PPAP)	(xxx)
Piutang anggota & pihak lain	xxx
Persediaan	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
Kewajiban segera	xxx
Tabungan wadi'ah	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>xxx</b>
<b>INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>	
Tabungan Mudharabah	xxx
Simpanan berjangka	xxx
Perorangan	xxx
Badan	xxx
ZIS	xxx
<b>Jumlah Investasi Tidak Terikat</b>	<b>xxx</b>
<b>EKUITAS</b>	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Kewajiban, Investasi Tidak Terikat, dan Ekuitas</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Data yang diolah



**Tabel 2**  
**BMT KP TURSINA**  
**LAPORAN LABA RUGI (PENYESUAIAN PSAK NO. 101)**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR DESEMBER 2010**

Uraian	Jumlah
<b><i>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BMT sebagai Mudharib</i></b>	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil tabungan Jabal Tsur	xxx
Pendapatan bagi hasil tabungan Jabal Nur	xxx
Pendapatan administrasi	xxx
<b><i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BMT sebagai Mudharib</i></b>	<b><i>xxx</i></b>
<b><i>Pendapatan usaha lainnya</i></b>	
Pendapatan dari rekening selisih	xxx
Pendapatan lain – lain	xxx
Pendapatan non-halal	xxx
<b><i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i></b>	<b><i>xxx</i></b>
<b><i>Beban Usaha</i></b>	
Beban bagi hasil	(xxx)
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban usaha lainnya	(xxx)
Beban pelunasan dini	(xxx)
Biaya cadangan	(xxx)
<b><i>Jumlah Beban Usaha</i></b>	<b><i>(xxx)</i></b>
<b><i>Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan</i></b>	<b><i>xxx</i></b>

*Sumber : Data yang diolah*

**Tabel 3**  
**KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PSAK NO. 101**  
**(Dengan Menggunakan Data Checklist)**

Komponen Laporan Keuangan	Sesuai / Tidak sesuai	Keterangan
<b>NERACA</b>		
Apakah asset lancar disajikan terpisah dari asset tidak lancar?	Sesuai	
Apakah kewajiban jangka pendek disajikan terpisah dari kewajiban jangka panjang?	Sesuai	
Apakah perusahaan menyajikan pos-pos yang minimal mencakup kas dan setara kas, asset keuangan, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,	Sesuai	

asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, utang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas, serta modal saham dan pos ekuitas lainnya?		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
Apakah perusahaan menyajikan pos-pos yang minimal mencakup pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, pendapatan dan beban non-usaha, serta laba atau rugi bersih untuk periode berjalan?	Sesuai	
Apakah dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas)?	Sesuai	
Apakah pendapatan non-halal tidak boleh disajikan dalam komponen laporan laba rugi perusahaan?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina masih menyajikan akun pendapatan non-halal dalam laporan laba rugi
<b>PERUBAHAN EKUITAS</b>		
Apakah komponen laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen laporan perubahan ekuitas
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
Apakah perusahaan menyusun komponen laporan arus kas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen laporan arus kas
<b>SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT</b>		
Apakah komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat telah disajikan dalam perusahaan atas unsur dasar	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat

yang meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu?		
<b>SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Apakah komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan telah disajikan dalam perusahaan atas unsur dasar yang meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>		
Apakah perusahaan menjelaskan secara naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam komponen laporan keuangan lainnya?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen catatan atas laporan keuangan
Apakah juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar?	Tidak Sesuai	BMT KP Tursina belum menyusun komponen catatan atas laporan keuangan

## **KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No.101 pada BMT KP Tursina, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PSAK No. 101 belum sepenuhnya diterapkan oleh BMT KP Tursina. Hal ini disebabkan karena belum lengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh BMT KP Tursina untuk mempertanggung

jawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.

2. Peneliti memberikan skor penilaian tingkat kesesuaian khususnya pada laporan keuangan neraca sebesar 100% dan laporan laba rugi sebesar 67%.

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara dikarenakan adanya pembukaan kantor baru yang menyebabkan pihak BMT KP Tursina keberatan untuk ditemui.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk pihak BMT terkait adalah sebagai berikut:

1. BMT KP Tursina diharapkan dapat membuat laporan keuangan berbasis PSAK No. 101 terhadap penyajian laporan keuangan syariah untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.
2. BMT KP Tursina agar menyesuaikan akun - akun yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 pada komponen neraca yaitu:
  - 1) Akun tabungan & simpanan pada bank diubah menjadi penempatan pada bank lain.
  - 2) Akun aktiva tetap dan akun akumulasi penyusutan aktiva tetap dijadikan dalam satu nama akun yaitu akun aset tetap dan akumulasi penyusutan.
  - 3) Akun penyisihan penghasilan pembiayaan dari piutang murabahah diubah menjadi akun penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
3. BMT KP Tursina agar menyesuaikan laporan laba rugi sesuai dengan PSAK No. 101 dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan usaha dibagi menjadi pendapatan dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil, serta pendapatan administrasi dalam laporan keuangan BMT KP Tursina disajikan dalam laporan laba rugi yang diurutkan setelah pendapatan dari bagi hasil.
  - b) Pendapatan lain – lain yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan urutan setelah laba usaha. Pendapatan lain – lain dalam laporan keuangan BMT KP Tursina terdiri dari pendapatan dari rekening selisih, pendapatan non halal, serta pendapatan lain – lain. Dimana pendapatan non halal tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi BMT KP Tursina. Informasi mengenai pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan

dana kebajikan. Adapun alasan tidak boleh disajikan karena penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

- c) Beban usaha BMT KP Tursina merupakan segala biaya baik yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam kegiatan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan dalam suatu periode akuntansi, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan perusahaan pada periode berikutnya. Yang terdiri dari beban bagi hasil, beban kepegawaian, beban usaha lainnya, beban pelunasan dini, serta biaya cadangan.
- d) Dalam penyajian dan klasifikasi pos – pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten dalam penggunaan nama akun yang terkait. Misalkan dalam komponen neraca terdapat akun simpanan berjangka yang berkaitan dengan perhitungan beban bagi hasil atas akun tersebut. Namun perhitungan beban bagi hasil atas akun tersebut disajikan dengan nama akun beban bagi hasil deposito dalam komponen laporan laba rugi BMT KP Tursina. Sehingga untuk menyesuaikan penyajian penggunaan nama akun yang terkait maka akun beban bagi hasil deposito dirubah menjadi beban simpanan berjangka.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Andini, Isnani Yuli dan Hayati, Nur. 2009. “Penerapan PSAK No. 101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syari’ah Pamekasan”. Jurnal

- NeO-Bis, Vol. 3, No. 1, (Juli) hlm. 11-25.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian: Sejarah, Teori, & Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hartoto. 2009. Artikel Penelitian Deskriptif. *Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar*, diakses 26 November 2011)
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2003. "Penilaian Asset Dalam Akuntansi Syari'ah". JAAI, Vol. 7, No. 1, (Juni) hlm. 77-93.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Musyarofah Siti. 2009. "Evaluasi Penerapan Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 59." Skripsi tak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prabowo, Hendi Yogo. 2003. "Beyond The Limit Of A Theory Indonesia Case Of Islamic Banking Accounting Standards". JAAI, Vol. 7, No. 1, (Juni) hlm. 67-75.
- Sitio, Arifin dan Halaman Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitra M.A., Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Warren, Feess, and Reeve. 1995. *Accounting*. 18th.Ed. Cincunati, ohio: South-Western College Publishing.